

RESTRUKTURALISASI INDUSTRI JEPANG DAN KEBIJAKAN DALAM HUBUNGAN UTARA-SELATAN*

Ryokichi HIRONO

PENDAHULUAN

Konsep dan strategi restrukturalisasi industri telah menjadi populer dan tidak asing lagi di Jepang purna-perang, berbeda dengan negara-negara OECD lainnya. Dalam tahun-tahun segera setelah perang beberapa industri strategis seperti besi dan baja, pembuatan kapal, pertambangan batu bara dan pembuatan pupuk telah dipilih sebagai sektor prioritas yang mendapat alokasi istimewa bahan-bahan baku industri, pabrik dan peralatan serta devisa di samping pembiayaan industri, dan berbagai insentif pajak juga disediakan bagi para penanam modal yang memodernisasi dan/atau mengembangkan pabrik dan peralatannya. Dalam kondisi ekonomi internal dan eksternal yang ada industri-industri itu dianggap strategis guna membangun kembali ekonomi Jepang yang rusak karena peperangan.

Dengan pembangunan kembali ekonomi yang hancur itu yang kurang lebih diselesaikan pada pertengahan tahun 1950-an ketika produksi industri mencapai tingkat pra-perang 1934/1936, dan dengan sumber energi yang beralih dari batubara ke minyak yang lebih murah, perkembangan industri petro-kimia serta modernisasi dan pengembangan industri besi dan baja dan logam menjadi sangat penting dalam membawa industri Jepang ke tingkat yang sebanding dengan negara-negara OECD. Impor minyak, bijih besi dan sumber-sumber daya mineral lainnya, mesin dan perlengkapan sangat cepat, bersama dengan impor teknologi maju dari Amerika Serikat dan beberapa negara industri maju lainnya, dalam program industrialisasi yang dibiayai

*Makalah yang disampaikan dalam Kolokium Indonesia-Jepang ke-9, yang disponsori oleh CSIS di Surabaya, tanggal 20-22 Agustus 1981. Diterjemahkan oleh Budi S. SATARI. Ryokichi Hirono adalah Profesor pada Universitas Seikei.

terutama oleh ekspor tekstil, mainan dan produk padat karya lainnya serta pinjaman luar yang cukup besar. Kemudian pada tahun 1960-an terjadi dorongan berat terhadap industri strategis seperti mesin-mesin listrik dan elektronika, peralatan transportasi, alat-alat presisi dan industri mesin-mesin lainnya, semua itu ikut mempertahankan laju ekspor dan perkembangan ekonomi yang tinggi yang pada gilirannya mempercepat pengembangan dan modernisasi industri strategis ini di bawah rezim perdagangan yang lebih liberal dan berkembang.

Adalah wajar mengatakan bahwa sasaran utama strategi restrukturalisasi industri adalah dua: memudahkan perkembangan dan modernisasi industri Jepang agar sesuai dengan perubahan tingkat dan pola permintaan domestik dan seberang laut dan mempercepat proses penyusulan perkembangan industri dan teknologi negara-negara maju. Dan barangkali wajar pula mengatakan bahwa strategi restrukturalisasi industri Jepang itu telah berhasil mencapai kedua sasaran tersebut pada awal tahun 1970-an dan memungkinkan industri Jepang bersaing dengan sukses di pasar internasional.

Akan tetapi baru dengan timbulnya krisis energi pada tahun 1973/1974 dan meningkatnya peringatan *Limits to Growth* Kelab Roma, kendala-kendala fisik atas sumber-sumber daya pada tingkat global diperhitungkan dalam merumuskan kembali strategi restrukturalisasi industri Jepang. Demikianpun, perhatian global atas lingkungan yang dipercepat oleh perdebatan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konperensi-konperensi dunia sejak awal tahun 1970-an, menjadi unsur penting pertimbangan dalam pengarahannya kembali strategi untuk tahun 1970-an. Meningkatnya dengan cepat gaji dan harga tanah, bersama dengan revaluasi akut yen Jepang dan tekanan-tekanan inflasioner yang terus menerus di dalam negeri ikut menyebabkan relokasi industri Jepang yang kehilangan daya saingnya di pasar internasional ke negara-negara di Asia dan di mana saja. Maka, strategi restrukturalisasi industri Jepang pada tahun 1970-an mempunyai dua sasaran tambahan untuk mengembangkan dan memodernisasi industri Jepang agar sesuai dengan perubahan tingkat dan pola keterbatasan suplai tanah, sumber-sumber daya alam dan manusia dan memperbaiki kualitas kehidupan yang secara sadar dilakukan di banyak negara OECD. Dalam strategi industrialisasi yang lebih tinggi itu pengembangan dan modernisasi elektronika konsumen, mikro-prosesor, alat-alat telekomunikasi, peralatan otomatis dan industri padat-teknologi lainnya dirangsang, sementara penggunaan komputer elektronik dan peralatan kantor otomatis lainnya dalam sektor distribusi dan pelayanan meluas, dan secara demikian ikut memodernisasi sektor industri tersier yang sampai sekarang belum berkembang. Terjadi pula perkembangan yang pesat dalam usaha penelitian dan pengembangan dan pembiayaan bagi teknologi hemat-energi dan hemat-sumber daya, khususnya pada akhir tahun 1970-an.

Setelah pada umumnya berhasil mengejar tingkat perkembangan industri dan teknologi negara-negara utama OECD, dan menghadapi kemajuan ekonomi dan teknologi yang lebih lambat di negara-negara industri yang menanggulangi tekanan-tekanan inflasioner -- di samping menghadapi kemajuan mantap negara-negara industri baru yang menyusul negara industri dan negara-negara berkembang berpenghasilan menengah lain yang menyusul beberapa negara industri baru serta melebarnya kesenjangan ekonomi antara negara-negara berkembang itu dan negara-negara berpenghasilan rendah dalam dasawarsa 1980-an -- strategi restrukturalisasi industri yang akan dilakukan oleh Jepang harus memperhatikan sepenuhnya meningkatnya tanggung jawab ekonomi, finansial dan teknologinya dalam masyarakat internasional. Khususnya, Jepang diharapkan untuk menggerakkan semua kemampuan finansial, teknologi dan institusionalnya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di bawah kendala-kendala fisik, ekonomi dan sosial yang ada. Selain itu Jepang juga diharapkan untuk merestrukturalisasi industrinya tidak saja untuk memelihara daya saing internasionalnya di berbagai sektor strategis tetapi juga untuk membuka pasar dalam negeri yang berkembang baik bagi hasil pertanian maupun industri yang diekspor oleh negara industri lainnya dan negara berkembang di mana Jepang tidak mempunyai keuntungan komparatif. Di samping itu, Jepang juga diharapkan untuk ikut menunjang kemajuan ilmu dan teknologi dalam penghematan energi dan pengembangan sumber-sumber energi dan bahan baku industri alternatif di samping membiayai penyesuaian struktural global dalam bekerja sama dengan negara-negara OECD dan OPEC dan lembaga-lembaga keuangan internasional.

RESTRUKTURALISASI INDUSTRI: MASA LALU, SEKARANG DAN MASA MENDATANG

Restrukturalisasi industri di tahun 1980-an diperkirakan akan jauh berbeda dengan yang dilakukan selama tahun 1950-1974 dan sampai tingkat tertentu dari apa yang terlihat selama masa purna-krisis energi, dalam tiga hal: kecepatan, dampak dan kebijakan.

Proses restrukturalisasi industri Jepang purna-perang berjalan dengan cepat selama tahun 1955-1974 sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Meskipun berbeda di antara industri yang bermacam-macam, perluasan produksi dan kesempatan kerja adalah cepat dan di seluruh sektor pabrik. Perluasan itu sangat cepat dalam industri berat dan kimia seperti bubur kayu dan kertas, karet dan produk karet, kimia, produk-produk batubara dan minyak, besi dan baja, logam nonbesi, produk logam buatan,

listrik, pengangkutan, mesin-mesin dan peralatan umum dan presisi serta industri keramik, tetapi agak lambat dalam industri pangan, minuman, tembakau, tekstil, pakaian, produk kayu, furniture dan kulit. Dalam semua industri ini perluasan adalah lebih cepat dalam produksi daripada kesempatan kerja, dan dalam industri tekstil kesempatan kerja bahkan menurun dibandingkan dengan periode 1965-1974 seperti halnya dalam industri lainnya yang tumbuh lebih lambat, meskipun ada perluasan produksi. Juga -- sebagai ungkapan kekurangan sumber daya manusia yang lebih besar sejak akhir tahun 1960-an -- tingkat perluasan kesempatan kerja selama tahun 1970-1974 menurun bahkan dalam industri yang tumbuh paling cepat, sehingga lebih banyak buruh diganti dengan modal dan perbaikan produktivitas. Tetapi kecepatan restrukturalisasi industri selama masa purna-krisis energi menurun secara dramatis akibat kemunduran pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dan pertumbuhan industri khususnya. Selama tahun 1974-1978, produksi sebenarnya menurun dalam kayu dan produk kayu dan industri besi dan baja seperti halnya dengan kesempatan kerja dalam industri tekstil, pakaian, produk kayu, perkakas rumah, bubur kayu dan kertas, percetakan dan penerbitan, kulit dan produk kulit, karet, kimia, produk batubara dan minyak, keramik dan produk tanah liat, dan semua industri pertumbuhan tinggi.

Dalam tahun 1980-an akan terdapat suatu kecenderungan kemunduran produksi dan kontraksi kesempatan kerja yang berlanjut dalam sebagian besar industri perpabrikasi Jepang dan kecenderungan perluasan produksi dan kesempatan kerja di sektor tersier. Hal itu menyerupai kecenderungan umum yang terjadi di banyak negara OECD selama dasawarsa yang lalu maupun sekarang. Satu-satunya kekecualian dalam kecenderungan ini kemungkinan besar akan dilihat dalam berbagai industri pabrik-pabrik permesinan dan produk logam di mana inovasi teknologis diharapkan akan paling aktif.

Kecepatan tinggi restrukturalisasi industri selama dua dasawarsa sebelum krisis energi menyebabkan tempo tinggi dalam perbaikan produktivitas di kebanyakan industri yang pada gilirannya sangat banyak ikut mempertahankan tingkat tinggi investasi untuk perluasan dan perbaikan pabrik dan peralatan, tingkat perluasan kesempatan kerja yang tinggi, tingkat kenaikan gaji dan upah yang tinggi dan stabilitas harga -- bahkan penurunan harga, seperti terlihat untuk banyak macam barang konsumen misalnya pesawat televisi, mesin cuci, lemari es dan mobil penumpang. Perluasan dan modernisasi investasi pabrik dan peralatan itu lebih lanjut memungkinkan industri Jepang untuk mengurangi biaya produksi melalui keunggulan skala besar dan program rasionalisasi perusahaan. Peningkatan cepat dalam kesempatan kerja, penghasilan upah dan stabilitas harga memperbesar daya beli buruh, dan selanjutnya menyebabkan kenaikan konstan tabungan dan konsumsi pribadi.

Penurunan biaya produksi dalam waktu yang diperpanjang di kebanyakan industri perpabrikasi juga memperbaiki daya saing harga mereka di pasar internasional, yang bersama dengan daya saing nonharga mempercepat perluasan ekspor mereka yang pada gilirannya memungkinkan industri Jepang untuk mengimpor minyak, gas alam, bahan baku dan barang modal dalam jumlah yang semakin meningkat untuk menggerakkan proses produksi modern mereka.

Kendala neraca pembayaran yang selalu mendorong pemerintah mengambil tindakan-tindakan kebijakan deflasioner pada tahun 1950-an dan 1960-an untuk membatasi impor yang meningkat sambil meningkatkan ekspor, menjadi semakin kurang penting menjelang akhir tahun 1960-an; hal itu memungkinkan industri Jepang mengembangkan penanaman modalnya di luar negeri untuk mendapat pasaran bagi produk mereka, sumber pengadaan bahan baku yang perlu, sumber daya energi dan tenaga kerja dengan biaya yang lebih rendah. Dengan demikian lingkaran yang baik itu terus berjalan dalam ekonomi Jepang sampai terpuak keras pada tahun 1973-1974 oleh kenaikan harga minyak mentah empat kali lipat secara mendadak dan sangat memburuknya neraca pembayarannya kemudian tekanan-tekanan inflasioner yang meningkat perlahan-lahan yang menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan yang sangat menyusutkan.

Dampak perlambatan restrukturalisasi industri selama tahun 1974-1981 tampaknya agak menyolok. Tidak saja perluasan kesempatan kerja negatif atau lambat seperti halnya di banyak industri perpabrikasi, tetapi kenaikan upah dan gaji menjadi lambat secara dramatis akibat menurunnya kenaikan produksi dan produktivitas. Dengan penurunan tingkat kenaikan gaji secara dramatis akibat menyusutnya jam kerja dan menurunnya tingkat kenaikan gaji tahunan selama itu, konsumsi pribadi tidak naik secepat kenaikannya pada masa pra-krisis energi, dan hal itu juga tercermin dalam penanaman modal pabrik dan peralatan dalam industri perpabrikasi. Tingkat pengangguran mutlak dan kemungkinan kekurangan pekerjaan meningkat dengan menyolok di bawah tindakan moneter dan fiskal yang lebih ketat segera setelah krisis energi, meskipun secara bertahap diredakan oleh perluasan fiskal pada tahun 1976 dan seterusnya. Terdapat juga tanda yang meningkat bahwa terjadi pengangguran struktural dalam ekonomi Jepang seperti tercermin dalam memanjangnya periode pengangguran di kalangan pekerja yang lebih tua.

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi itu, kasarnya dua persen dari angkatan kerja, bertahan dalam tahun-tahun terakhir ini sebagian karena menurunnya permintaan akan tenaga kerja akibat pertumbuhan yang lebih lambat dan meningkatnya penggantian buruh dengan modal di kantor maupun di bidang produksi, dan sebagian lagi karena perubahan yang terjadi

pelan-pelan dalam peri laku pengadaan buruh. Buruh wanita yang dulu keluar dari pasar buruh pada waktu kelangkaan pekerjaan sekarang tidak akan meninggalkan pasar dan malah mencari pekerjaan baru, baik *full* maupun *part-time*, untuk menambah pendapatan keluarga. Perubahan ini mungkin disebabkan sebagian oleh lamanya "stagflasi" dalam ekonomi Jepang beberapa tahun terakhir ini dan sebagian lagi oleh perubahan sosial dalam kebiasaan dan sikap kerja para buruh wanita. Hal lain yang mencerminkan lebih lambatnya perluasan dalam seluruh kesempatan kerja dan pengurangan tenaga kerja di sektor perpabrikkan -- di mana serikat buruh secara tradisional lebih kuat -- dan pengurangan kenaikan gaji di semua sektor industri adalah melemahnya tekanan-tekanan serikat buruh terhadap para majikan dan pimpinan perusahaan baik yang kecil maupun besar, sehingga para majikan lebih mudah menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dan kebiasaan buruh lainnya dengan perubahan teknologi dan finansial. Selain itu, dalam industri distribusi dan jasa di mana perluasan kesempatan kerja terlihat lebih menyolok dalam beberapa tahun terakhir ini, para pekerja secara tradisional kurang terorganisasi dan serikat buruh kurang berkuasa.

Kebijakan pemerintah dalam restrukturalisasi industri telah mengalami perubahan besar selama tiga dasawarsa terakhir, khususnya sejak pertengahan tahun 1970-an, akibat pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan munculnya serangkaian industri yang tertekan secara struktural misalnya tekstil, aluminium, pupuk kimia dan pembangunan kapal. Bobot yang diberikan pada tindakan penyesuaian defensif ini semakin berat dalam tahun-tahun terakhir ini, meskipun ditonjolkan tindakan penyesuaian positif yang merupakan ciri kebijakan restrukturalisasi industri Jepang dalam masa purnaperang dan yang membedakan kebijakan Jepang dari kebijakan negara-negara OECD lainnya.

Selama masa pertumbuhan cepat sebelum krisis energi 1973/1974, tindakan kebijakan utama yang mempercepat langkah restrukturalisasi industri terdiri dari pelaksanaan terus menerus kebijakan persaingan efektif, termasuk undang-undang anti-trust dan mekanisme implementasi aktifnya, dalam pasar produk, dan diambilnya di pasar faktor alat-alat kebijakan kredit selektif, fiskal dan tenaga kerja yang menyokong perkembangan industri-industri strategis di setiap waktu. Dipertahankannya kompetisi efektif antara berbagai perusahaan yang sebagian bersumber pada pembubaran *Zaibatsu* pada akhir tahun 1940-an dan terutama pada implementasi aktif undang-undang anti-trust pada tahun 1950-an dan sebagian besar tahun 1960-an menjamin para konsumen usaha-usaha serikat untuk melakukan inovasi teknologis dalam proses produksi guna mengurangi biaya produksi dan/atau mengembangkan produk baru atau memperbaiki mutu produk sebagai tanggapan atas perubahan selera konsumen dan kebutuhan teknis produsen. Kebijakan

kompetisi efektif yang terus menerus itu juga membantu menjamin bahwa ekonomi Jepang akan memperbaiki produktivitasnya melalui alokasi sumber-sumber daya ekonomi yang lebih rasional, diversifikasi struktur industri, penguatan dasar teknologi dan finansial dan posisi neraca pembayarannya. Di bawah kompetisi efektif, baik modal maupun teknologi dan sumber daya manusia akan pindah dari perusahaan yang kurang efisien ke perusahaan yang lebih efisien, dan dari sektor produktivitas rendah ke sektor yang lebih produktif, dan peranan kebijakan pemerintah adalah untuk mempercepat perpindahan sumber-sumber daya itu ke arah yang diinginkan sambil memperkecil biaya sosial yang terlibat dalam realokasi sumber-sumber daya seperti itu dalam waktu yang singkat, lebih singkat daripada waktu yang diberikan apabila beroperasi di bawah kekuatan pasar saja. Sekalipun, kompetisi yang sebenarnya tidak efektif secara sempurna di semua pasar produk selama masa yang sedang dipertimbangkan, strategi restrukturalisasi industri yang dianut oleh Pemerintah Jepang pada pokoknya memainkan peranan mempercepat perpindahan itu. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta perluasan dan diversifikasi industri pada pokoknya telah membantu memperkecil biaya sosial yang terjadi di berbagai sektor akibat percepatan perpindahan itu. Suatu contoh baik kebijakan pemerintah mempercepat restrukturalisasi industri dan perpindahan sumber-sumber daya berhubungan dengan penggantian batubara dan minyak pada tahun 1950-an dan penggantian minyak dengan gas alam pada tahun 1960-an dan pada awal tahun 1970-an dalam pembangkitan tenaga (listrik) dan panas.

Upaya-upaya finansial dan administratif untuk memperkecil dislokasi majikan dan pekerja melalui Program Rasionalisasi Industri Pertambangan Batubara berhasil dengan mengejutkan. Keberhasilan itu memungkinkan industri pertambangan untuk melakukan rasionalisasi dalam dirinya sendiri melalui penutupan tambang-tambang yang tidak efisien, merangsang relokasi industri pertumbuhan ke kota dan daerah pertambangan yang ditinggalkan, mempermudah penempatan kembali buruh tambang yang tersisih ke industri pertumbuhan di tempat lain melalui program latihan ulangan buruh, subsidi keluarga dan bantuan transportasi dan perumahan. Program bantuan pemerintah untuk industri pertambangan batubara itu akan menelan biaya yang lebih tinggi dan akan jauh dari berhasil, seandainya lingkungan ekonomi pada tahun 1950-an kurang menguntungkan karena tiada serangkaian industri pertumbuhan yang muncul di bidang ekonomi seperti sebenarnya terjadi dalam dasawarsa itu. Penggantian minyak dengan gas alam selama tahun 1960-an dan awal 1970-an tidak menimbulkan masalah dalam negeri sehingga tidak diperlukan tindakan penyesuaian, sebab kedua sumber daya energi itu diimpor dari luar negeri dan terjadi pada masa pertumbuhan ekonomi tinggi di mana permintaan energi berkembang dengan cepat.

Sementara proses penyesuaian dalam industri yang mundur dipermudah baik oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat dan perluasan industri maupun oleh tindakan bantuan pemerintah untuk menghapuskannya pelan-pelan secara bertahap, berbagai tindakan positif diambil oleh pemerintah untuk menggalakkan pengembangan industri pertumbuhan strategis. Bank Pembangunan Jepang, Bank Ekspor-Import Jepang dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah lainnya dikerahkan untuk membiayai investasi dalam pabrik dan peralatan pada industri pertumbuhan dan ekspornya. Sumber-sumber daya keuangan bank-bank komersial juga disediakan bagi industri-industri pertumbuhan strategis ini melalui pengawasan dan pengarahan informal Bank Jepang dan melalui hubungan kerja tradisional antara bank-bank utama dan perusahaan-perusahaan nonbank yang "berafiliasi" dengan bank-bank itu. Penurunan atau pengecualian pajak, bersama dengan percepatan depresiasi pabrik dan peralatan yang dipasang, diberikan secara murah kepada industri pertumbuhan itu yang juga menerima pembebasan pajak impor atas mesin-mesin yang diimpor dan alokasi devisa istimewa untuk teknologi tinggi yang diimpor. Pemerintah sering membantu industri strategis dengan membiayai kegiatan penelitian dan pengembangannya dengan tujuan untuk memperbaiki proses produksi dan mutu produk di samping mengembangkan produk baru. Selain itu, usaha lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah diarahkan untuk memudahkan pengembangan industri strategis. Kebijakan dan tindakan bantuan positif inilah yang mempercepat perkembangan industri pertumbuhan di Jepang purna-perang dan mempermudah penghapusan bertahap yang terus menerus dari industri mundur yang kehilangan keuntungan komparatif dan daya saingnya dalam pasar internasional.

Mengingat bahwa sejak pertengahan tahun 1970-an strategi restrukturalisasi industri Jepang terus mempunyai "dua sasaran yaitu mempermudah masalah-masalah langsung dalam penyesuaian dan memaksimalkan keuntungan komparatif struktur ekonominya yang berubah menuju pertumbuhan ekonomi yang berlanjut,"¹ perubahan penting telah terjadi sehubungan dengan tujuan fundamental kebijakan ekonomi dan kebijakan restrukturalisasi Jepang. Pengejaran tingkat pertumbuhan ekonomi dan perluasan ekspor yang setinggi mungkin selama periode 1950-1974 telah diganti dengan pertumbuhan moderat yang sesuai dengan penggalakan kerja sama internasional dan perbaikan kesejahteraan sosial dan ekonomi, termasuk lingkungan, di dalam negeri. Tindakan-tindakan kebijakan pemerintah dalam bidang kredit, fiskal dan tenaga kerja telah diarahkan kembali pada pengembangan industri strategis yang sesuai dengan tujuan dan prioritas kebijakan yang baru -- misal-

¹Ryokichi Hirono, "Japan's Industrial Adjustment Policies in Response to Growing Manufactured Imports from Developing Countries," dalam Komisi Brandt, *The Brandt Commission Papers*, IBIDI, Geneva-The Hague, 1981, hal. 97.

nya kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembangunan kota, keamanan lingkungan dan nasional -- dan pada pengembangan teknologi dan industri yang sesuai dengan kendala-kendala pengadaan baru -- misalnya penghematan energi, sumber-sumber energi alternatif dan otomatisasi. Jenis tindakan kebijakan bantuan positif sebagian telah berubah dari bantuan pemerintah di pasar faktor menjadi partisipasi dan inisiatif pemerintah dalam mendirikan perusahaan baru dalam bekerja sama dengan sektor swasta. Pergeseran dalam bentuk bantuan pemerintah itu mungkin disebabkan sebagian oleh sifat dan jenis produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan semacam itu yang pada umumnya berorientasi sosial, dan banyak menguntungkan masyarakat dan/atau sebagian lagi oleh modal raksasa yang diperlukan dan mengandung resiko yang tinggi -- misalnya dalam pengembangan sumber-sumber energi alternatif.

Lebih lanjut lagi, cakrawala penggalakan persaingan efektif antara perusahaan-perusahaan telah diperluas untuk meliputi ekspor perusahaan-perusahaan yang bersaing di luar negeri. Penurunan pajak impor dan hambatan-hambatan nontarif serta perbaikan dalam jalan masuk bagi perusahaan asing untuk memasuki pasar Jepang melalui penerapan Skema Preferensi Umum (GSP) yang luas termasuk tindakan kebijakan semacam itu. Langkah-langkah kebijakan itu yang lebih lanjut membebaskan impor dari negara-negara berkembang dan industri adalah sejalan dengan perubahan tujuan kebijakan ekonomi secara menyeluruh yang dewasa ini antara lain mencakup penggalakan kerja sama internasional. Karena GNP Jepang melebihi 10% dari dan impor Jepang melebihi 12% dari impor dunia, usaha liberalisasi perdagangan Jepang akan banyak membantu percepatan perluasan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Harus diingat pula bahwa karena impor Jepang dalam prosentase dari GNP-nya terus meningkat selama ini -- dan mempertinggi interdependensi ekonominya dengan seluruh dunia -- adalah lebih penting bahwa Jepang melaksanakan kebijakan perdagangan yang lebih bebas untuk memberikan rangsangan yang lebih besar baik bagi negara-negara industri maupun negara-negara berkembang agar meneruskan restrukturalisasi industri masing-masing di bawah persaingan internasional yang lebih diperluas.

Perubahan yang jauh lebih besar telah terjadi sejak krisis energi tahun 1973-1974 dalam arah dan jenis tindakan penyesuaian yang diambil untuk menggalakkan rasionalisasi industri-industri yang mundur dan mengalami tekanan struktural secara beruntun dalam ekonomi Jepang. Sekalipun benar bahwa banyak tindakan kebijakan penyesuaian yang diambil sejak pertengahan tahun 1970-an belum berubah benar-benar menjadi defensif dari positif, beberapa sifat tindakan penyesuaian defensif perlahan-lahan masuk dalam paket kebijakan untuk menangani penghapusan bertahap industri yang

mundur dan pelurusan bertahap industri yang mengalami tekanan struktural. Banyak pengecualian dari Undang-undang anti-monopoli semakin sering diberikan kepada berbagai industri yang mundur dan tertekan itu untuk memungkinkan mereka melakukan pengaturan kartel produksi dan harga, yang akan membatasi persaingan dalam waktu tertentu, dan ini seringkali diperpanjang di luar waktu yang layak. Subsidi bunga diberikan pula kepada industri mundur tertentu untuk memperpanjang hidup mereka dan bukan untuk mempermudah proses penghapusan, di bawah tekanan kuat dari para majikan, organisasi mereka dan federasi serikat buruh yang dirugikan oleh penghapusan itu. Dalam beberapa industri penetapan kuota impor yang berat dilakukan kembali meskipun ditentang oleh para pendukung perdagangan bebas baik di dalam maupun di luar pemerintah, di bawah tekanan politik dari beberapa pihak. Penurunan hambatan impor nontarif sering masih sulit untuk didapatkan, kecuali kalau pemerintah terus menerus ditekan oleh mereka yang percaya pada rezim perdagangan liberal baik di dalam maupun di luar negeri.

Tindakan penyesuaian defensif perlahan-lahan telah masuk ke dalam strategi restrukturalisasi industri positif yang secara tradisional pada dasarnya karena dua alasan. Yang pertama adalah kenyataan bahwa dampak merugikan atas industri yang mundur tertentu telah menjadi sangat meluas dan serius, akibat efek simultan dari perubahan teknologi, struktur permintaan, persaingan pasar dan kebijakan ekonomi makro dan mikro pemerintah terhadap tingkat pengangguran yang relatif tinggi pada tahun-tahun terakhir ini. Seperti disebutkan di atas, pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat telah memperdalam dampak merugikan faktor-faktor yang beroperasi secara simultan dan saling memperkuat dalam waktu yang relatif panjang. Alasan lain terletak pada kenyataan bahwa investasi yang terlalu besar dalam pabrik dan peralatan serta fasilitas yang berhubungan dalam masyarakat setempat telah dilakukan dalam industri yang mundur semacam itu untuk waktu yang lama, dan melibatkan terlalu banyak perusahaan, terlalu banyak pekerja dan terlalu banyak penduduk sehingga penghapusan industri semacam itu secara politis membahayakan dan secara ekonomi mahal, mengingat lamanya periode "stagflasi" pada masyarakat yang dirugikan itu di mana penggunaan alternatif modal, teknologi dan tenaga kerja hampir tidak mungkin. Dengan pertumbuhan lambat yang menurut proyeksi akan terus berlangsung sampai tahun 1980-an, kemungkinan cukup besar tindakan penyesuaian defensif itu akan terus perlahan-lahan masuk dalam strategi restrukturalisasi industri Jepang yang sampai saat ini terkenal karena kebijakan dan prinsipnya yang positif dan melihat jauh ke depan. Segala usaha harus terus dilakukan untuk mencegah pencemaran seperti itu terhadap alat kebijakan ekonomi yang paling penting dalam menghadapi kecenderungan melihat ke dalam dalam hubungan ekonomi internasional dewasa ini.

Perubahan besar lainnya dalam jenis tindakan penyesuaian yang menjadi semakin meningkat selama tahun 1970-an dibandingkan dengan tahun 1960-an dan sebelumnya adalah penggunaan investasi langsung di luar negeri sebagai bagian dari paket kebijakan pemerintah untuk menangani penghapusan bertahap industri yang mundur di dalam negeri. Pada masa defisit neraca pembayaran yang terus menerus rumus kebijakan ini adalah mustahil, tetapi sejak pertengahan 1960-an ketika surplus perdagangan lebih sering terjadi, tempo investasi Jepang di luar negeri ditingkatkan. Sebagian sebagai tanggapan terhadap program industrialisasi di negara-negara penerima dan sebagian karena perubahan persediaan faktor-faktor dan harga relatif di luar negeri agar tetap dapat bersaing dalam pasar internasional di samping pasar-pasar penerima. Dalam beberapa hal, daya saing mereka di pasar Jepang telah terancam dan hal ini juga memudahkan investasi mereka di luar negeri. Dari segi strategi restrukturalisasi industri, adalah paling murah bagi pemerintah apabila tidak turut campur dalam proses perluasan investasi di luar negeri oleh industri-industri Jepang ini, karena adalah jelas seperti ditunjukkan oleh pengalaman kita sendiri bahwa industri-industri yang keluar dari Jepang melalui investasi di luar negeri biasanya adalah industri yang telah kehilangan daya saingnya di pasar internasional termasuk pasar Jepang, yaitu industri yang mundur dan merupakan sasaran logis restrukturalisasi industri untuk dihapuskan perlahan-lahan. Bahkan dalam situasi ini, pemerintah bisa membantu industri-industri itu untuk memperluas investasi mereka di luar negeri sambil memperkecil kapasitas produksi mereka di dalam negeri, untuk mempercepat penghapusan mereka di Jepang. Sekalipun tidak diberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan Jepang yang melakukan investasi di luar negeri (kecuali dalam kasus-kasus tertentu), diberikannya pinjaman berbunga-rendah oleh Bank Eksim untuk ekspor mesin dan peralatan pabrik yang berhubungan dengan investasi di luar negeri serta revaluasi Yen Jepang terhadap mata-mata uang utama -- bersama dengan partisipasi pemilikan dan pinjaman oleh Dana Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri (OECD) dalam proyek-proyek eksplorasi dan pengembangan sumber-sumber daya besar oleh perusahaan-perusahaan Jepang dalam suatu konsorsium yang dinamakan proyek-proyek nasional -- telah merupakan perangsang penting bagi investasi Jepang di luar negeri. Dengan demikian, investasi di luar negeri mempunyai kedudukan yang penting dalam strategi restrukturalisasi industri Jepang dalam tahun-tahun terakhir ini.

RESTRUKTURALISASI INDUSTRI DAN DAMPAKNYA PADA HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI JEPANG

Dampak restrukturalisasi industri Jepang itu terasa tidak saja di dalam negeri tetapi juga di luar negeri terutama melalui tiga saluran utama hubungan ekonomi luar negerinya, yaitu perdagangan, investasi dan bantuan.

Struktur ekspor barang-barang manufaktur Jepang telah bergeser secara dramatis selama periode purna-perang dari orientasi barang-barang ringan pada permulaan ke produk-produk berat dan kimia pada akhir tahun 1960-an dan sesudahnya. Pada tahun 1955, produk-produk industri ringan merupakan 52% dari seluruh ekspor Jepang, tetapi menurun menjadi 12,5% pada tahun 1977, sedangkan produk-produk industri berat dan kimia meningkat dari 38% menjadi 84,7% dari keseluruhan ekspor Jepang dalam waktu yang sama. Dewasa ini, dalam banyak produk industri Jepang merupakan saingan yang terkuat di pasar internasional dan terdengar keluhan-keluhan yang meningkat di Amerika Serikat dan negara-negara Masyarakat Eropa bahwa industri Jepang sekarang telah melampaui produksi mereka di bidang tersebut di mana secara tradisional merekalah yang terkuat. Kadang-kadang, tingkat perluasan ekspor Jepang dalam produk-produk padat-modal dan padat-teknologi itu terlalu tinggi untuk dapat diatasi oleh para pengusaha Amerika Serikat dan Eropa sehingga makin keraslah seruan-seruan mereka di luar negeri akan pemasaran teratur -- termasuk pembatasan ekspor "sukarela" yang harus dilakukan oleh industri Jepang di bawah pengawasan pemerintah, dan juga akan tindakan proteksionis bagi industri dalam negeri yang kehilangan daya saing internasionalnya -- termasuk bahkan kuota impor, pembekuan andil pasar bagi impor dari Jepang, skema penetapan harga mendadak, dan undang-undang anti-dumping (banting harga).

Demikianpun, struktur impor Jepang mengalami perubahan yang berarti, dan hal itu mencerminkan tempo tinggi restrukturalisasi industri sampai krisis energi 1973-1974 dan kenaikan harga minyak mentah dan sumber energi lainnya yang mendadak sejak itu. Impor barang-barang manufaktur meningkat dari 22,1% dari seluruh impor Jepang pada tahun 1960 menjadi 30,4% pada tahun 1970, dan meneruskan bagiannya dalam impor nonminyak. Tetapi, termasuk impor minyak dan sumber energi lain, persentasenya menurun dengan tajam menjadi 20,3% pada tahun 1975, meskipun kembali menjadi 22,8% pada tahun 1980. Dari impor barang-barang manufaktur yang meningkat, barang-barang modal secara tradisional berasal dari negara-negara industri, sedangkan impor barang-barang konsumen secara meningkat berasal dari negara-negara berkembang, terutama dari kawasan tetangga Asia. Impor dari negara-negara Asia Timur telah meningkat lebih cepat, yaitu dari 2,4% seluruh impor Jepang pada tahun 1960 menjadi 3% pada tahun 1970, 2,1% pada tahun 1975 dan 6,3% pada tahun 1980, dibandingkan dengan impor dari negara-negara ASEAN, yaitu dari 12% pada tahun 1960 hanya menjadi 12,1% pada tahun 1980. Dalam jumlah dollar, terjadi suatu perluasan impor yang tajam baik dari negara-negara Asia Timur maupun ASEAN selama periode tersebut, yaitu berturut-turut dari AS\$ 106 juta menjadi AS\$ 8.632 juta, dan dari AS\$ 539 juta menjadi AS\$ 16.579 juta.

Investasi langsung Jepang di luar negeri juga menunjukkan perluasan yang besar selama dua dasawarsa terakhir ini, dan hal itu mencerminkan pergeseran mendasar dalam struktur industri Jepang dari industri ringan padat karya ke industri berat dan kimia yang lebih padat modal dan teknologi. Sampai tahun 1968 investasi langsung Jepang di luar negeri setiap tahunnya hanya berjumlah AS\$ 560 juta, tetapi secara berangsur-angsur meningkat mencapai jumlah AS\$ 3.490 juta pada tahun 1973, dan meningkat lebih jauh lagi menjadi AS\$ 5 milyar pada tahun 1979, dengan jumlah modal yang mencapai AS\$ 36,5 milyar pada akhir Maret 1981. Dari jumlah itu, AS\$ 2,602 milyar atau 7,1% berada di negara-negara Asia Timur, dan AS\$ 7,021 milyar atau 19,2% di negara-negara ASEAN. Mayoritas investasi langsung Jepang di negara-negara industri terdapat dalam sektor-sektor distribusi dan tersier, termasuk perbankan dan asuransi sedangkan industri manufaktur merupakan mayoritas di negara-negara berkembang, disusul oleh investasi di bidang eksplorasi dan pengembangan sumber-sumber daya. Tetapi, sejak akhir tahun 1970-an, suatu jumlah investasi yang meningkat mengalir ke sektor manufaktur di negara-negara industri, terutama sebagai tanggapan atas kesulitan-kesulitan lebih besar yang dihadapi oleh para pengusaha Jepang untuk mengeksport ke negara-negara itu, sebagian sebagai akibat harga tanah dan buruh yang lebih tinggi di Jepang dan meningkatnya kebijakan proteksionis di negara-negara itu. Dengan tidak adanya pembatasan devisa, dengan naiknya gaji dan biaya masukan lainnya, ketidakpastian yang lebih besar dalam pengadaan sumber daya alam yang terus menerus -- termasuk energi -- dan berlanjutnya pelaksanaan program industrialisasi yang lebih tinggi di negara-negara industri baru dan negara-negara berpenghasilan menengah lainnya, investasi langsung Jepang di luar negeri akan terus meluas pada tahun 1980-an di sektor-sektor manufaktur, sumber-sumber daya dan distribusi/tersier. Tindakan proteksionis di negara-negara industri akan lebih lanjut mempercepat investasi Jepang di luar negeri, khususnya dalam industri-industri manufaktur di mana perusahaan-perusahaan mereka kehilangan daya saingnya baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Khususnya di Eropa, investasi dan kerja sama industri lebih diharapkan daripada ekspor dari Jepang, dan ekspor Jepang menjadi suatu kata "kotor".

Tetapi, harus dicatat bahwa dengan meningkatnya investasi langsung Jepang di luar negeri terjadi pula peningkatan ekspor barang-barang modal Jepang dan peningkatan impor barang-barang konsumen asing, yang tentu saja berhubungan satu sama lain. Dalam perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di luar negeri dalam banyak industri logam dan permesinan bagian masukan yang berarti diimpor dari Jepang, antara 60,6% untuk permesinan dan peralatan listrik dan 82,2% untuk mesin presisi. Di lain pihak, mayoritas barang-barang yang mereka buat di luar negeri dijual di pasar-pasar lokal, tetapi ekspor mereka ke Jepang bukanlah tidak berarti dalam beberapa in-

dustri terpilih. Jelaslah, bahwa perusahaan-perusahaan sumber daya yang datang dari Jepang itu telah mengeksport mayoritas dari produknya ke Jepang, meskipun pasar-pasar lokal menjadi semakin penting berkat industri yang semakin maju seperti di banyak negara berkembang. Menurut survei Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Internasional tahun 1979, jumlah orang yang dipekerjakan pada perusahaan-perusahaan yang berpusat di Jepang di luar negeri meningkat dari 465.300 orang menjadi 710.560 selama periode 1973-1978, dengan bagian terbesar di negara-negara Asia, yaitu 62,8% pada tahun 1978.

Dengan efek besar-besaran dari investasi langsung Jepang di luar negeri terhadap ekonomi Jepang -- yang umumnya agak menguntungkan dalam perluasan dan diversifikasi ekspor, peningkatan keamanan pengadaan sumber-sumber daya dengan harga wajar, impor berbagai barang konsumen dengan harga rendah anti-inflasioner serta latihan bagi para pengelola Jepang dan staf teknis dalam operasi internasional, dan sebagai jawaban atas meningkatnya kebutuhan finansial dan teknis di negara-negara berkembang untuk pembangunan sosial dan ekonomi lebih lanjut serta himbauan yang berulang-ulang dari masyarakat internasional untuk perluasan bantuan guna mempercepat tingkat pembangunan sosial dan ekonomi di negara-negara berkembang -- dan mempersempit kesenjangan ekonomi dan teknologi antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang -- dan dengan demikian ikut mempertahankan perluasan ekonomi dunia serta perdamaian dan keamanan dunia, Jepang telah meningkatkan bantuan pembangunan resminya (ODA) sambil meringankan syarat dan kondisi dalam penyediaan bantuan itu serta memperbaiki mutu dan dampak bantuan itu selama tahun 1970-an. ODA Jepang yang dilaksanakan berjumlah AS\$ 486 juta rata-rata setahunnya selama tahun 1969-1971, tetapi terus meningkat selama dasawarsa berikutnya sehingga mencapai pengeluaran tahunan sejumlah AS\$ 2,638 milyar pada tahun 1979. Dari seluruh jumlah ODA bilateral sebesar AS\$ 1,9212 milyar pada tahun 1979, 69,9% adalah untuk negara-negara berkembang di Asia, dengan 41,2% untuk Asia Tenggara dan 2,5% untuk Asia Timur.

Proporsi yang tinggi dari ODA bilateral Jepang telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi, pembangunan pertanian dan pengembangan sumber daya; ketiga sektor ini menelan 82,6% dari jumlah ODA pada tahun 1979. Ada dua alasan pokok mengapa pola semacam itu dipakai dalam ODA Jepang sejak bertahun-tahun. Pertama, dengan kepercayaan bahwa bantuan itu dimaksudkan untuk membantu negara-negara penerima guna pembangunan ke arah berdikari, ODA Jepang telah dikonsentrasikan pada pembangunan infrastruktur fisik yang penting bagi semua jenis pembangunan ekonomi. Alasan lainnya ialah kepercayaan atau pemikiran tradisional bahwa

Jepang harus memperhitungkan keuntungan komparatifnya dalam memilih jenis-jenis proyek pembangunan. Sekalipun kemungkinan besar pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan, latihan tenaga kerja, kesehatan dan gizi dan pengembangan teknologi hemat energi dan sumber energi alternatif bisa mendapat prioritas dalam ODA Jepang tahun 1980-an, ciri-ciri utamanya pada pokoknya tidak akan berubah, kecuali kalau falsafah yang mendasari program Jepang harus diubah. Terdapat indikasi sehubungan dengan hal ini bahwa sebagai ungkapan perubahan dalam hubungan internasional yang melibatkan kedua superpower dan tumbuhnya kesadaran Jepang akan tanggung jawab politiknya dalam masyarakat internasional khususnya di Asia-Pasifik, falsafah ODA Jepang yang telah lama dianut mungkin akan mengalami perubahan perlahan-lahan ke arah pemberian bobot yang lebih besar kepada apa yang dinamakan "bantuan strategis".

Program ODA Jepang harus memperluas komponen bantuan teknisnya lebih cepat dari yang telah dilakukan sampai sekarang guna membantu negara-negara berkembang bergerak lebih jauh menuju phase industrialisasi yang lebih tinggi. Sekalipun banyak kebutuhan teknis yang berhubungan dengan industrialisasi yang lebih tinggi dapat dipenuhi melalui berlanjutnya perluasan investasi swasta langsung dari Jepang dan negara industri lain, ODA Jepang dapat membantu perbaikan tingkat umum pendidikan teknik dan program latihan serta pengembangan penelitian ilmiah dan teknik serta kapasitas dan lembaga-lembaga pembangunan di negara-negara berkembang. Dengan memberikan bantuan teknis serupa itu untuk industrialisasi yang lebih tinggi, usaha-usaha harus diperluas untuk memobilisasi tenaga-tenaga teknis yang tepat baik yang tersedia di sektor swasta maupun sektor pemerintah. Dengan demikian, berlanjutnya restrukturalisasi industri di Jepang akan meminta dan mengharuskan tidak saja perluasan yang terus menerus dalam bantuan teknik tapi juga perubahan dan reorientasi yang tak henti-hentinya dalam pokok bantuan itu, sebagai jawaban atas perubahan kebutuhan teknis di negara-negara berkembang.

DAFTAR ISI ANALISA 1980 - 1981

TAHUN IX, 1980

1. BERBAGAI MASALAH EKONOMI INTERNASIONAL (Rp. 500,00):
 - J. PANGLAYKIM, *Beberapa Pandangan Mengenai Perkembangan Nilai Dollar Amerika*
 - N. ARSJAD, *Benarkah Sistem Nilai Tukar Mengambang Sedang Diuji?*
 - R.B. SUHARTONO, *Hubungan-hubungan Ekonomi Indonesia—Amerika Serikat*
 - J. PANGLAYKIM, *Multinational Corporation: Bisnis Internasional dan ASEAN*
 - Saduran oleh Kirdi DIPOYUDO, *Kerawanan Suplai Minyak Negara-negara Barat* (Audrey PARRY)
2. PEDESAAN FOKUS PEMBANGUNAN (Rp. 500,00):
 - A. Rahman RANGKUTI, *Memperbaiki Kelestarian Alam dan Mengurangi Kemiskinan di Pedesaan Jawa dengan Lamtoroisasi dan Arenisasi*
 - S. Sunarto NDARU MURSITO, *Sumber Daya Manusia di Pedesaan Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi*
 - Jacob OETAMA, *Pers dan Pembangunan Desa*
 - Raymond ATJE, *Konsumsi Energi di Sektor Rumah Tangga Desa*
 - Saduran oleh H. CAROKO, *Perencanaan Ekonomi Pedesaan RRC* (Jon SIGURDSON)
3. KAWASAN TELUK ARAB-PARSI DALAM PEREBUTAN (Rp. 500,00):
 - Michael B. SOEBAGYO, *Intervensi Soviet di Afghanistan dan Implikasi Internasionalnya*
 - B. WIROGUNO, *Harga Intervensi Militer Uni Soviet di Afghanistan*
 - Kirdi DIPOYUDO, *Kawasan Teluk Parsi dalam Perebutan*
 - Saduran oleh Rin Purwani BUDI, *Arti Geopolitik Minyak Teluk Parsi* (Thomas STAUFFER)
 - Saduran oleh Alfian MUTHALIB dan Kirdi DIPOYUDO, *Negara-negara Superpower di Kawasan Teluk Parsi* (John C. CAMPBELL)
4. MENGAMANKAN SUPLAI ENERGI (Rp. 500,00):
 - Saduran oleh Kirdi DIPOYUDO, *Energi Dunia adalah Suatu Dilema yang dapat Diatasi* (John P. HENRY)
 - Saduran oleh Kirdi DIPOYUDO, *Perebutan Minyak Timur Tengah* (Edgar O'BALLANCE)
 - Saduran oleh Rin Purwani BUDI, *Dimensi-dimensi Baru Pengelolaan Energi di Kawasan Asia-Pasifik* (Hadi SOESASTRO)
 - Michael B. SOEBAGYO, *Prospek Pemasaran Internasional Gas Alam Indonesia*
 - Ronald NANGOI, *Energi Alternatif Utama Australia: Batubara dan Uranium*
5. KAWASAN SAMUDERA HINDIA FOKUS KETEGANGAN (Rp. 500,00):
 - B. WIROGUNO, *Samudera Hindia Fokus Konfrontasi Superpower*
 - Saduran oleh A.R. SUTOPO, *Suatu Pendekatan Barat Terhadap Samudera Hindia* (Dov ZAKHEIM)
 - Kirdi DIPOYUDO, *Gerak-gerak Uni Soviet di Jazirah Arab dan Tanduk Afrika*
 - Otto ABDULRACHMAN, *Revolusi Iran di Tengah Pergolakan Timur Tengah*
 - Ronald NANGOI, *Arti Samudera Hindia Bagi Australia*
 - Michael B. SOEBAGYO, *Kemenangan Indira Gandhi dan Implikasinya Terhadap Kawasan yang Bergolak*

6. BERBAGAI MASALAH DALAM NEGERI (Rp. 500,00):

- Hadi SOESASTRO, *Kebutuhan Energi bagi Rumah Tangga Desa di Indonesia*
- Rio TAMBUNAN, *Arti dan Konsekuensi Membangun Masyarakat Modern dan Bagaimana Cara-caranya Mengatasi Akibat-akibat serta Pengaruh-pengaruh yang Negatif*
- Pande Radja SILALAH, *Peningkatan Pendidikan, Pemerataan Pendapatan dan Perluasan Kesempatan Kerja*
- Alfian LAINS, *Peningkatan Produksi Padi di Indonesia Melalui Peningkatan Hasil Rata-rata Padi Per Hektar*
- Rufinus LAHUR, *Beberapa Masalah Komunikasi dan Pengembangan Pedesaan*
- Murwatie B. RAHARDJO, *Penduduk, Angkatan Kerja dan Pembagian Pendapatan: Indonesia dan Brasilia dalam Perbandingan*

7. JEPANG DALAM DUNIA YANG BERUBAH (Rp. 500,00):

- Hadi SOESASTRO, *Jepang dalam Dunia yang Berubah*
- Pande Radja SILALAH, *Beberapa Aspek dari Kesinambungan Pemerintahan "LDP"*
- J. PANGLAYKIM, *Perekonomian Jepang di Persimpangan Jalan?*
- R.B. SUHARTONO, *Perekonomian Dunia dan Jepang*
- Budi S. SATARI, *Kebijakan Pertahanan Jepang*

8. PERJUANGAN KEADILAN SOSIAL (Rp. 500,00):

- Radius PRAWIRO, *Menggerakkan Segenap Kemampuan dan Potensi Dalam Negeri dalam Pembangunan untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi*
- Kirdi DIPOYUDO, *Arti dan Isi Keadilan Sosial*
- Alfian LAINS, *Garis Kemiskinan dan Penentuan Kecamatan Miskin di Sumatera Barat*
- Murwatie B. RAHARDJO, *Strategi Demografi dalam Rangka Pemerataan Pendapatan*
- Nancy Kumalasari SUHUT, *Permasalahan KIK dan KMKP*

9. ASIA TENGGARA DALAM SOROTAN (Rp. 500,00):

- Jusuf WANANDI, *Dimensi-dimensi Keamanan Asia Tenggara*
- Asnani USMAN, *Langkah-langkah Penyelesaian Masalah Kamboja*
- Sutomo ROESNADI, *Diplomasi dan Kepentingan Nasional: India dan Krisis Indocina*
- R.S. ROOSMAN, *Persetujuan Perbatasan Indonesia—Papua Niugini*
- J. PANGLAYKIM, *Hubungan Perdagangan Jepang—ASEAN: Beberapa Masalah dan Prospek*
- R.S. ROOSMAN, *Pelarian dari Irian Masalah Tanggung Jawab Bersama*

10. PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT (Rp. 500,00):

- Saduran oleh H. CAROKO, *Pendidikan dan Masyarakat (C. Arnold ANDERSON)*
- E. SOENARYA, *Menyongsong Pelaksanaan Kewajiban Belajar Tingkat Pendidikan Dasar*
- Murwatie B. RAHARDJO, *Pendidikan Sebagai Sarana Pemerataan Pendapatan*
- A. Sudiharto DJIWANDONO, *Dimensi Pendidikan, Pembauran dan Pembangunan Nasional*
- Rufinus LAHUR, *Belajar dari Kepeloporan Pemuda 1928*

11. PERKEMBANGAN DI AFRIKA (Rp. 500,00):

- Saduran oleh B. WIROGUNO, *Benua Afrika dalam Pergolakan (Basil DAVIDSON)*
- Kirdi DIPOYUDO, *Nigeria Kembali ke Pemerintahan Sipil*
- Oct. Ovy NDOUK, *Prospek Pemerintahan Mayoritas Zimbabwe Pimpinan Robert Mugabe*
- Saduran oleh Alfian MUTHALIB, *Fokus Atas Tanduk Afrika (Hakan WIBERG)*
- Budi S. SATARI, *Perang di Sahara Barat: Sengketa Wilayah atau Perjuangan Kemerdekaan?*

12. WANITA HAKEKAT DAN PANGGILANNYA (Rp. 500,00):

- Saduran oleh Kirdi DIPOYUDO, *Kemanusiaan Genius Wanita* (Ashley MONTAGU)
- Rin Purwani BUDI, *Kedudukan Wanita antara Harapan dan Kenyataan*
- Saduran oleh Kirdi DIPOYUDO, *Tugas Utama Wanita* (Ashley MONTAGU)
- Murwatie B. RAHARDJO, *Wanita Indonesia dan Pendidikannya*
- Nancy Kumalasari SUHUT, *Wanita Indonesia dan Kesempatan Kerja*
- H. CAROKO, *Pria dan Wanita dalam Perkawinan*

TAHUN X, 1981

1. BERBAGAI MASALAH NASIONAL (Rp. 500,00):

- Daoed JOESOEF, *Ilmu Pengetahuan bagi Pembangunan Kesehatan Nasional*
- A.M.W. PRANARKA, *Bahasa Indonesia dalam Hubungannya dengan Pengembangan Kebudayaan Nasional*
- J. SUPRANTO, *Keadaan Ekonomi di Indonesia Berdasarkan Tabel Input-Output 1975*
- Murwatie B. RAHARDJO, *Wawasan Buruh di Indonesia*
- SUKANTO, *Beberapa Masalah dari Sistem Komunikasi Massa di Indonesia*

2. AKTUALITAS INTERNASIONAL (Rp. 500,00):

- Jusuf WANANDI, *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Bawah Presiden Reagan*
- Kirdi DIPOYUDO, *Latar Belakang, Prospek, dan Implikasi-implikasi Perang antara Irak dan Iran*
- Otto ABDULRACHMAN, *Pasukan Gerak Cepat Amerika Serikat, Operasi Militer di Mana?*
- Asnani USMAN, *Konflik Batas-batas Teritorial di Kawasan Perairan Asia Timur*
- Budi S. SATARI, *Perlombaan Senjata di Asia Timur*

3. PEMBANGUNAN PEDESAAN (Rp. 500,00):

- H. CAROKO, *Pembangunan Pedesaan Fokus Pembangunan Nasional*
- Saduran oleh Murwatie B. RAHARDJO, *Perubahan Pendekatan Pembangunan Pedesaan* (Eddy LEE)
- Sunarto NDARU MURSITO, *Gambaran Umum tentang Pembangunan Pedesaan di Indonesia*
- Rin Purwani BUDI, *Pengembangan Kesempatan Kerja Nonpertanian di Pedesaan Indonesia*
- A. Sudiharto DJIWANDONO, *Peningkatan Efektivitas Organisasi Pembangunan Pedesaan*
- Sunarto NDARU MURSITO, *Suatu Tinjauan atas Kemiskinan Struktural di Pedesaan Indonesia*

4. RRC CALON RAKSASA DUNIA (Rp. 500,00):

- Saduran oleh Kirdi DIPOYUDO, *RRC Raksasa yang Sedang Bangun* (Michael YAHUDA)
- Budi S. SATARI, *Pergantian Kepemimpinan di RRC*
- Endi RUKMO, *Struktur Kekuasaan Politik di RRC dalam Era Post-Mao*
- Budi S. SATARI, *Pola Pemilikan, Organisasi Ekonomi dan Penanaman Modal Asing di RRC*
- Bantarto BANDORO, *Hubungan Indonesia—RRC*
- Oct. Ovy NDOUK, *Penyerbuan RRC ke Vietnam: Suatu Pelajaran?*

5. ORIENTASI PEMBANGUNAN NASIONAL (Rp. 500,00):

- Kirdi DIPOYUDO, *Negara Kesejahteraan Orientasi Pembangunan*
- Murwatie B. RAHARDJO, *Arti Pemanfaatan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan*
- Sutomo ROESNADI, *Potensi Wilayah dan Modernisasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan*
- Rin Purwani BUDI, *Industri Kecil Indonesia, Mampukah Berperan?*
- Pande Radja SILALAH, *Beberapa Catatan tentang Pemanfaatan dan Manfaat Proyek Asahan*
- Sunarto NDARU MURSITO, *Arah Pengembangan Transmigrasi untuk Pembangunan Nasional*
- William SOERYADJAYA, *Melalui Agribisnis menuju ke Swasembada Pangan dan Peningkatan Ekspor Indonesia*

6. TIMUR TENGAH PUSARAN STRATEGIS (Rp. 500,00):

- Kirdi DIPOYUDO, *Eskalasi Pertarungan Superpower di Timur Tengah*
- Saduran oleh B. WIROGUNO, *Kawasan Teluk Parsi Pusaran Strategis Krisis Dunia* (James R. SCHLESINGER)
- Kirdi DIPOYUDO, *Irak Kekuatan Baru di Timur Tengah*
- Saduran oleh Bambang WALGITO, *Selat Hormuz dan Keamanan Jalur Minyak suatu Tantangan bagi Strategi Amerika Serikat* (Richard Earl HANSEN)
- B. WIROGUNO, *Persepsi Rezim Iran mengenai Perang Irak—Iran*
- B. WIROGUNO, *Situasi Dalam Negeri Iran sebelum Perang dengan Irak*

7. SEGI-SEGI PEMBANGUNAN EKONOMI (Rp. 500,00):

- Hadi SOESASTRO, *Minyak Tanah sebagai Unsur Pemerataan*
- Raymond ATJE, *Peranan Kayu Bakar dalam Pemerataan*
- Pande Radja SILALAH, *Aspek Sekuriti dari Energi dalam Dekade 1980-an*
- Sunarto NDARU MURSITO, *Bahan Pangan untuk Membangun Manusia Indonesia*
- J. PANGLAYKIM, *Proyek Asahan: Suatu Pandangan dari Sektor Bisnis*
- William SOERYADJAYA, *Peranan Wiraswasta dalam Pengelolaan Agribisnis*

8. PERKEMBANGAN DI ASIA TENGGARA (Rp. 500,00):

- Jusuf WANANDI, *Pengaturan-pengaturan Keamanan di Asia Tenggara*
- Ronald NANGOI, *Sikap Amerika Serikat terhadap Keamanan Kawasan Asia Tenggara*
- Alfian MUTHALIB, *Perkiraan Ancaman Militer Vietnam Dilihat dari Eskalasi Pertahanan Muangthai*
- Ronald NANGOI, *Diplomasi Singapura terhadap Masalah Indocina*
- Budi S. SATARI, *Modernisasi Pertahanan RRC dan Keamanan Asia Tenggara*
- Asnani USMAN, *Masalah Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 200 Mil Indonesia*
- Endi RUKMO, *Rezim Baru dalam Hukum Laut dan Implikasinya terhadap Kekuatan Laut di Asia Tenggara*

9. MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR (Rp. 500,00):

- Kirdi DIPOYUDO, *Masyarakat Adil Makmur Tujuan Perjuangan Bangsa*
- Rin Purwani BUDI, *Pentingnya Koperasi bagi Golongan Ekonomi Lemah*
- Pande Radja SILALAH, *Permasalahan Perkreditasi dalam Pembangunan*
- Saduran oleh Kirdi DIPOYUDO, *Negara Kesejahteraan Pengantar Masyarakat Adil Makmur* (Harry K. GIRVETZ)
- Andre BAYO ALA, *Strategi Anti-Kemiskinan Lima Tahap*
- H.HENRIARSO, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perlu Perhatian*

10. ASIA-PASIFIK DASAWARSA 1980-AN (Rp. 500,00):

- J. PANGLAYKIM, *Perubahan Struktural Beberapa Negara Industri di Kawasan Asia-Pasifik dan Kesempatan Bagi Indonesia*
- Hadi SOESASTRO, *Kerja Sama di Pasifik Barat Daya: Sebuah Pandangan ASEAN*
- Jusuf WANANDI, *Peranan Amerika Serikat di Kawasan Pasifik*
- Saduran oleh Bantarto BANDORO, *Keamanan di Kawasan Asia-Pasifik dan Pertahanan Jepang* (Kiichi SAEKI)
- Terjemahan oleh Rin Purwani BUDI, *Menuju Kerja Sama dan Interdependensi* (Lester L. WOLFF)
- Endi RUKMO, *Gagasan Masyarakat Pasifik: Suatu Tinjauan Singkat*
- Terjemahan oleh Kirdi DIPOYUDO, *Masalah-masalah Keamanan Asia Tenggara Menurut Suatu Pandangan Jepang* (Naotoshi SAKONJO)

11. PENDIDIKAN DAN KOMUNIKASI (Rp. 500,00):

- H. CAROKO, *Hakikat dan Sasaran Pendidikan*
- Murwatie B. RAHARDJO, *Pendidikan Kejuruan dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*
- Rufinus LAHUR, *Masalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4): Ditinjau dari Segi Masyarakat*
- Parsudi SUPARLAN, *Pola-pola Komunikasi untuk Masyarakat Kota dan Masyarakat Desa: Sebuah Pendekatan*
- SUKANTO, *Beberapa Masalah Komunikasi Interpersonal dalam Masyarakat Pedesaan*
- Terjemahan oleh Bambang WALGITO, *Strategi dan Kenyataan Pendidikan dan Pembangunan di Kenya dan Tanzania* (Ernest STABLER)

12. PERTARUNGAN TIMUR—BARAT (Rp. 500,00):

- Hadi SOESASTRO, *Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam "Perang Dingin" Kedua dan Implikasinya bagi Asia Tenggara*
- Bantarto BANDORO, *Tujuan Strategi Global Uni Soviet dalam Dasawarsa 1980-an*
- Saduran oleh Alfian MUTHALIB, *Rencana Uni Soviet untuk Mencapai Kemenangan dalam Perang Nuklir* (Edgar O'BALLANCE)
- Kirdi DIPOYUDO, *Pokok-pokok Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Bawah Presiden Reagan dan Dampaknya Atas Asia Khususnya Asia Tenggara*
- Alfian MUTHALIB, *Perimbangan Kekuatan Lautan Superpower*
- Saduran oleh B. WIROGUNO, *Kawasan Teluk Parsi Pusat Pertarungan Superpower* (Robert HARVEY)
- Endi RUKMO, *Persengketaan Amerika Serikat—Uni Soviet di Pasifik*
- Oct. Ovy NDOUK, *Beberapa Aspek Politik Luar Negeri RRC*

